

## MEMAHAMI TRANSISI PEMUDA PERBATASAN

Oki Rahadianto Sutopo

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

E-mail: [oki.rahadianto@ugm.ac.id](mailto:oki.rahadianto@ugm.ac.id) / [oki.rahadianto@gmail.com](mailto:oki.rahadianto@gmail.com)

**Abstract:** *This article presents an analysis of youth transition that lives in the borderland area. By using qualitative methods, the research found that during the process of transition, borderland youth had to negotiate with the structural obstacles especially the lack of basic facilities, such as electricity supply, road, education, and health. Furthermore, those structural obstacles as well as rapid social change had an impact for the pathways of borderland youth transition. There were three pathways from school to work transition: fast track transition, stay in the village and become a peasant or move to other area to work as a labor. However, the transitions of borderland youth were still facing the uncertainty in the future. The State had to give supports for borderland youth to eliminate structural obstacles by building some of the basic facilities in the village.*

**Key words:** *transition; borderland youth; structural obstacles*

**Abstrak:** Artikel ini menjelaskan mengenai transisi pemuda dari daerah perbatasan. Dengan menggunakan metode kualitatif ditemukan bahwa dalam proses transisi, pemuda perbatasan mengalami hambatan-hambatan struktural terutama minimnya fasilitas dasar seperti listrik, jalan, pendidikan dan kesehatan. Hambatan struktural ini berdampak pada tiga rute transisi pemuda perbatasan menuju dunia kerja terutama paksaan untuk menempuh jalur cepat, menetap sebagai petani atau berpindah ke daerah lain sebagai buruh. Ketiga rute ini sama-sama menghadapi pemuda perbatasan pada kondisi ketidakpastian mengenai masa depan. Sebagai solusi, Negara perlu hadir untuk mereduksi hambatan-hambatan struktural yang harus dijalani oleh pemuda perbatasan dengan membangun fasilitas-fasilitas dasar.

**Kata Kunci:** transisi; pemuda perbatasan; hambatan struktural

### PENDAHULUAN

Dalam kajian kepemudaan, pemahaman akan masa transisi pemuda merupakan salah satu topik penting dan telah melalui perdebatan yang panjang di berbagai negara serta antartradisi yang berbeda. Dalam tradisi kajian kepemudaan di Inggris, pendekatan transisi pemuda terutama dari pendidikan ke dunia kerja muncul sebagai salah satu respon terhadap munculnya rezim *welfare state* serta dalam prosesnya mengalami berbagai revisi terutama setelah terjadi pergeseran menuju rezim Neoliberal (France, 2007). Perdebatan yang sering muncul terkait pergeseran menuju rezim Neoliberal adalah tahap transisi pemuda tidak lagi berlangsung secara linear dan deterministik melainkan mengalami perubahan pola menjadi bersifat *fragmented*, *precarious* dan *uncertain* (Furlong & Cartmel, 2007). Hal ini tidak hanya menjadi fenomena transisi pemuda di belahan

dunia selatan/*Global North* namun juga pengalaman transisi pemuda di belahan dunia selatan/*Global South* termasuk Indonesia (Sutopo, 2014; Sutopo & Azca 2013). Dalam tradisi kajian kepemudaan Australia, pergeseran menuju rezim Neoliberal dan dampaknya terhadap transisi pemuda memunculkan kembali pentingnya memahami perubahan sosial dan sosiologi generasi sebagaimana diusulkan oleh Karl Mannheim dan menjadikannya alternatif untuk menandingi perspektif transisi pemuda yang masih dominan (Wyn & Woodman, 2006). Sampai sekarang perdebatan antara perspektif transisi dengan perspektif generasi masih terus berlangsung (Roberts, 2007), termasuk diantaranya usulan akan pentingnya faktor kelas dan infiltrasi Neoliberalisme (France & Roberts, 2015).

Terlepas dari kegaduhan perdebatan kajian kepemudaan di atas, secara refleksif harus diakui bahwa beberapa studi terdahulu mengenai transisi pemuda cenderung bias pada pemuda perkotaan, bias kelas menengah, serta kental akan konteks perubahan sosial negara Barat terutama dari era *first modernity* menuju *late modernity* (Beck, 1992). Pertanyaan lebih lanjut yang perlu diajukan adalah bagaimana menjelaskan fenomena transisi pemuda di belahan selatan/*Global South* termasuk Indonesia yang tidak pernah mengalami rezim *Welfare State*? Secara historis, dari masa ke masa generasi pemuda di Indonesia tumbuh dalam konteks Kolonialisme, rezim Militer Otoritarian dan rezim Neoliberal atau dengan kata lain, konteks Sosiohistoris dalam proses transisi pemuda di *Global North* dan *Global South* relatif berbeda. Pertanyaan kritis selanjutnya adalah bagaimana menjelaskan fenomena transisi pemuda non-perkotaan dan bukan dari kelas menengah di Indonesia? Atau pertanyaan yang lebih eksplisit adalah lalu bagaimana menjelaskan proses transisi pemuda yang termasuk terpinggirkan salah satunya yaitu pemuda perbatasan? Kajian kepemudaan di Inggris mengkonstruksikan pemuda pinggiran salah satunya sebagai golongan *underclass* (Macdonald & Marsh, 2005) dalam konteks perkotaan, pasca industrialisasi dan *post-welfare state*. Dalam kasus Daerah Perbatasan di artikel ini (Dusun Merau), terpinggirkan dimaknai baik secara ruang (*space*) yang terisolir, keterbatasan akses dasar maupun sebagai akibat dari ketidakpedulian Negara terhadap pemuda di Daerah Perbatasan. Dengan mempertimbangkan perbedaan konteks tersebut, maka kontekstualisasi secara kritis dalam memahami transisi pemuda perbatasan merupakan hal yang penting. Dengan spirit kontekstualisasi secara kritis tersebut produksi pengetahuan akan menjadi lebih berwarna, lebih membumi dan tidak “memperkosakan” fenomena transisi pemuda di Indonesia atas nama keuniversalan teori dari *Metropole/Global North*.

Dengan spirit kontekstualisasi dalam produksi pengetahuan kepemudaan sebagaimana dijelaskan di atas, analisa dalam artikel ini menawarkan narasi-narasi yang berbeda mengenai fenomena transisi pemuda di Daerah Perbatasan dengan fokus di Dusun Merau, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sejauh penelusuran peneliti, belum ada studi terdahulu dalam kajian kepemudaan di Indonesia yang mengkaji fenomena transisi pemuda dari daerah perbatasan. Di sisi yang lain, beberapa studi terdahulu mengenai daerah perbatasan terutama

daerah Entikong tidak terfokus pada isu kepemudaan melainkan pada aspek ekonomi (Siburian, 2002), demografi politik (Tirtosudarmo, 2002) dan perlindungan anak (Wismayanti, 2012). Berangkat dari kekosongan akan kajian transisi pemuda perbatasan di Indonesia tersebut, artikel ini akan mencoba menginisiasi kajian awal dengan memfokuskan pada hambatan-hambatan struktural, *fast track transition*, mobilitas dan ketidakpastian (*uncertainty*) yang harus dihadapi pemuda perbatasan dalam menjalani proses transisi. Di sisi yang lain, analisa dalam artikel ini akan mencoba mengkontekstualisasikan dan mengkonstruksi konsep-konsep alternatif mengenai transisi pemuda perbatasan berdasarkan data empiris yang didapatkan selama proses penelitian. Inisiasi awal ini penting untuk mewujudkan agenda diversifikasi pemuda sebagai subjek kajian sekaligus akumulasi pengetahuan mengenai kajian kepemudaan Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Informan penelitian dipilih secara purposif berdasarkan rekomendasi dari *gate keeper*, sedangkan data sekunder didapatkan dari Profil Desa Entikong, Profil Dusun Merau dan sumber pustaka yang lain. Penentuan lokasi (Dusun Merau) sebagai fokus merupakan hasil interpretasi peneliti dari hasil diskusi dengan camat, kepala desa, dokter, penyuluh masyarakat, serta pembacaan akan Peta Ruang Desa Entikong.

Dusun Merau merupakan salah satu dusun di Desa Entikong diantara empat dusun yang lain, yaitu: Dusun Entikong, Pripin, Sontas dan Serangkang. Berikut beberapa argumen peneliti mengenai urgensi Dusun Merau sebagai fokus penelitian:

- 1) Dari lima Dusun yang termasuk wilayah Desa Entikong, dua dusun (Merau dan Serangkang) merupakan daerah dengan komoditas utama, yaitu: hasil pertanian dan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani.
- 2) Dua dusun lainnya, yaitu: Sontas dan Pripin merupakan perpaduan antara pertanian dengan perdagangan terutama sektor informal.
- 3) Satu dusun, yaitu Entikong memiliki karakter *sub-urban* dengan mayoritas penduduk bekerja dalam sektor perdagangan terutama sektor informal.
- 4) Dari kelima dusun tersebut, Dusun Entikong dibandingkan yang lain jauh lebih “maju”. Indikator kemajuan ini dapat dilihat dari berbagai segi mulai dari tersedianya fasilitas pendidikan berjenjang (SD-SLTP-SLTA), infrastruktur yang relatif lengkap serta aktivitas perdagangan yang dinamis.
- 5) Dua dusun lainnya, yaitu: Sontas dan Pripin dapat dikategorikan dalam kriteria “berkembang”. Hal ini tidak terlepas dari faktor kedekatan dengan Dusun Entikong sehingga memudahkan akses dalam berbagai kegiatan.

- 6) Dua dusun yang lain, yaitu: Serangkang dan Merau dapat dikategorikan dalam kriteria “tertinggal”. Hal ini dapat dilihat dari minimnya fasilitas pendidikan yang berjenjang, minimnya fasilitas kesehatan, mayoritas pekerjaan penduduk serta akses yang jauh dengan dusun yang lain dan bahkan dapat dikategorikan sebagai daerah terisolir.

Berdasarkan argumen di atas, peneliti memutuskan untuk mengunjungi lokasi terjauh yakni Dusun Merau dimana daerah ini mayoritas penduduknya masih berpencaharian sebagai petani, pola hidup sehari-hari masih menganut pola subsisten, belum ada listrik, tingkat pendidikan terendah dan akses jalan yang sulit, serta terisolir menuju lokasi. Peneliti diantar oleh salah satu kader yang berprofesi sebagai bidan yang secara rutin pulang dan pergi dari Dusun Entikong-Dusun Merau untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk setempat. Dengan menggunakan motor yang tidak begitu sehat kondisinya, Kami menuju lokasi dengan jarak tempuh mencapai 2-3 jam. Sejauh pengamatan peneliti, jalan menuju ke lokasi masih belum layak dilalui, didominasi oleh bebatuan dan juga kontur perbukitan membuat risiko perjalanan sangat besar. Sebagai bahan perbandingan, peneliti juga melakukan observasi di dua dusun yang lain, yaitu: Dusun Entikong dan Serangkang. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada tahun 2012.

### **Sekilas Mengenai Dusun Merau Kalimantan Barat**

Dusun Merau merupakan salah satu dusun yang relatif terisolir diantara dusun lainnya di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Secara spesifik, jarak antara Dusun Merau dengan Dusun Entikong adalah sejauh 20 km, sedangkan dengan Kabupaten Sanggau sekitar 170 km. Berdasarkan Profil Dusun Merau hingga 2011 yang diperoleh dari kepala dusun, daerah ini mempunyai luas wilayah 24,45 km<sup>2</sup>. Pada saat penelitian ini dilakukan, Profil Dusun tahun 2011 merupakan satu-satunya dokumentasi tertulis yang dimiliki oleh kepala dusun. Dokumentasi ini terdiri dari beberapa lembar kertas hasil tulisan tangan kepala dusun (Catatan Lapangan, 2012). Secara Geografis, batas-batas Dusun Merau antara lain: sebelah Timur dengan Tumenggung Serawak, Barat dengan Meraju Kabupaten Landak, Utara dengan Tabang/Pala Pasong, sedangkan sebelah Selatan dengan Dusun Serangkang. Secara Demografis, jumlah penduduk Dusun Merau pada tahun 2011 mencapai 658 jiwa dengan perincian 339 jiwa laki-laki dan 319 jiwa perempuan. Lebih lanjut dari total 658 jiwa tersebut dapat diperinci lagi menjadi: 168 jiwa merupakan kepala keluarga (KK), 95 jiwa merupakan balita, 162 merupakan usia sekolah, 375 jiwa tergolong usia produktif dan 24 jiwa termasuk golongan usia lanjut (manula). Mayoritas penduduk Dusun Merau beragama Kristen (343 jiwa) diikuti dengan Katolik (247 jiwa) dan Islam (47 jiwa).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, lebih banyak bersifat subsisten, terutama hasil pertanian berupa padi dengan pola ladang berpindah maupun ladang menetap. Hasil pertanian yang lain ialah sahang, kakao dan kacang juga sudah mulai diperjualbelikan. Mereka menjual hasil bumi tersebut dengan menggunakan jalur sungai, yakni menggunakan kapal sederhana menuju pasar tradisional di Desa Entikong dengan biaya sekali tempuh antara Rp. 30.000-Rp. 50.000, terutama saat masa panen tiba (Wawancara dengan Kepala Dusun, 30/9/2012). Pupuk untuk produk pertanian harus dibeli di Entikong dan mayoritas adalah produk Malaysia dan berharga mahal, disisi lain mereka juga mendapatkan bantuan pupuk kandang setiap tahun dari Dinas Pertanian. Terdapat dua kelompok tani di Dusun Merau dimana satu kelompok (Bukit Tungan) beranggotakan laki-laki dan kelompok (Karnais Bayau) beranggotakan perempuan, setiap kelompok beranggotakan 20 orang. Selain itu, terdapat kelompok ternak babi yang beranggotakan 15 orang. Mereka melakukan pertemuan rutin setiap satu bulan sekali untuk membahas berbagai hambatan dalam melakukan kegiatan pertanian. Kegiatan kemasyarakatan bertumpu pada dua kelompok ini, selain tentu saja yang bersifat formal dalam tingkat dusun. Karang Taruna tidak berperan besar dalam kegiatan sehari-hari, *entry point* kegiatan biasanya melalui kepala dusun. Selain itu, peneliti mengamati bahwa peranan lembaga gereja relatif besar dalam kegiatan masyarakat, bahkan Kepala Dusun Merau merangkap sebagai Ketua Majelis Gereja setempat. Dalam hal pertanian, gereja telah memiliki kelompoknya sendiri dengan nama Balai Tani Gereja. Mayoritas penduduk Dusun Merau masih menjalankan kegiatan keagamaan mereka secara rutin.

Dilihat dari segi pendidikan, mayoritas penduduk berpendidikan sekolah dasar dan hanya sedikit yang bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menurut pengamatan peneliti dikarenakan tidak adanya fasilitas pendidikan selain hanya sekolah dasar di dusun tersebut. Rendahnya fasilitas pendidikan ini juga terlihat dari masih adanya penduduk yang buta aksara (60 orang) sebagaimana tertulis dalam Profil Dusun (2011). Bagi penduduk usia muda di Dusun Merau, untuk melanjutkan SLTP mereka harus menyeberang ke Dusun Serangkang yang berjarak kurang lebih satu jam jika berjalan kaki. Sedangkan jika ingin melanjutkan pendidikan di atasnya, mereka harus pindah secara permanen ke Dusun Entikong. Tingkat pendidikan yang rendah membuat penduduk Merau mayoritas bekerja sebagai petani. Berikut disajikan tabel tingkat pendidikan penduduk Dusun Merau (2011):

**Tabel 1 Tingkat Pendidikan Penduduk Dusun Merau**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Lulusan SLTA	25 orang
Lulusan SLTP	35 orang
Lulusan SD	315 orang

Sumber: Profil Dusun Merau (2011)

Dari segi kesehatan, pelayanan yang diberikan masih minim. Kegiatan posyandu yang hanya dilakukan sebulan sekali menunjukkan kecenderungan ini. Selain itu, pengamatan terhadap fasilitas Poliklinik Desa (Polindes) menunjukkan bahwa baik obat maupun pendukung yang lain masih minim.

### **MEMAHAMI TRANSISI PEMUDA PERBATASAN**

Dalam memahami transisi pemuda perbatasan, peran peneliti sebagai subjek yang tidak terlepas dari konteks sosial-budaya yang membentuknya serta pengalaman masa lalu, termasuk posisi peneliti dalam ranah akademis dan dampak dari pengetahuan yang diproduksi penting untuk disadari secara reflektif (Bourdieu & Wacquant, 1992). Kesadaran reflektif ini sangat diperlukan dalam proses produksi pengetahuan dikarenakan jarak/gap yang relatif lebar antara *everyday life* termasuk *taken for granted knowledge* dari peneliti dibandingkan dengan kehidupan sehari-hari pemuda perbatasan. Aspek-aspek dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap “biasa” oleh peneliti, misalnya: ketersediaan fasilitas listrik, alat transportasi juga fasilitas pendidikan hingga tingkat lanjut merupakan fasilitas yang dianggap eksklusif atau mewah bagi pemuda perbatasan dikarenakan minimnya fasilitas di daerah perbatasan. Beberapa aspek yang dianggap sederhana dan *taken for granted* dalam kehidupan sehari-hari tersebut secara tidak langsung berpengaruh dalam cara pandang peneliti mengenai proses transisi pemuda. Secara spesifik proses refleksi ini dapat dikategorikan sebagai *individualistic reflexivity* (Maton, 2003).

Di sisi lain, perspektif transisi pemuda yang ada dalam kajian kepemudaan (Wyn & White, 1997) juga secara implisit memiliki asumsi bahwa transisi dari dunia pendidikan menuju ke dunia kerja adalah fase yang normal dan mengandaikan bahwa fasilitas-fasilitas seperti: pendidikan, listrik dan alat transportasi termasuk lapangan kerja yang memadai relatif telah tersedia dalam kehidupan sehari-hari. Secara reflektif menyadari bias posisi sosial peneliti sekaligus mencoba secara empati menempatkan diri dalam posisi pemuda perbatasan merupakan mekanisme metodologis yang mendasari produksi pengetahuan dalam artikel ini. Berdasarkan data empiris, observasi dan hasil refleksi, peneliti mengusulkan empat konsep kunci dalam memahami transisi pemuda perbatasan yaitu: hambatan struktural, *fast track transition*, mobilitas dan ketidakpastian.

## **Hambatan Struktural Dalam Transisi Pemuda Perbatasan**

Dalam kajian kepemudaan, pendekatan transisi memfokuskan pada transisi pemuda dalam tiga institusi yaitu keluarga, sekolah dan kerja (Macdonald & Marsh, 2005). Secara implisit, pendekatan ini mengasumsikan bahwa ketiga institusi tersebut secara relatif telah mendapatkan dukungan dan subsidi dari negara. Dengan kata lain, mengandaikan bahwa fasilitas dasar seperti listrik, jalan dan sekolah telah eksis secara objektif termasuk tunjangan kesejahteraan dari negara. Faktor-faktor pendukung ini tidak hadir secara maksimal dalam konteks transisi pemuda perbatasan di Dusun Merau. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, minimnya ketersediaan fasilitas dasar terutama dalam aspek infrastruktur seperti: listrik, jalan, sekolah dan fasilitas kesehatan merupakan fakta sosial objektif yang menjadi hambatan struktural dalam proses transisi pemuda perbatasan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan pembangunan Negara selama ini yang bias darat dan kota, menempatkan daerah perbatasan sebagai halaman belakang, *trickle-down effect* yang tidak efektif, serta pendekatan pembangunan yang birokratis-sentralistis, sehingga pembangunan daerah perbatasan sering diabaikan (Santoso *et.al*, 2015).

Berdasarkan hasil observasi, hambatan struktural berupa minimnya ketersediaan fasilitas dasar ini menjadi penghalang dalam dinamika kehidupan sehari-hari pemuda perbatasan. Faktor pertama yaitu tidak adanya fasilitas listrik dari negara membuat kegiatan pemuda perbatasan “terpaksa” berhenti setelah matahari terbenam. Untuk dapat mengakses listrik, setiap unit keluarga harus menggunakan minyak, bensin ataupun mesin diesel yang harus didapatkan dari Desa Entikong dengan jarak tempuh sekitar 2-3 jam, namun tidak semua keluarga di Dusun Merau mampu secara ekonomi mengakses bahan bakar ini. Ketiadaan fasilitas listrik ini membuat kehidupan sehari-hari pemuda menjadi terbatas sehingga dalam prosesnya mereka tereklusi dari “dunia luar”.

Dalam konteks Globalisasi sekarang ini, harus disadari secara realistis bahwa akses dan pembaharuan informasi, serta pengetahuan mengenai dinamika sosial baik lokal, nasional dan internasional merupakan modal budaya yang berharga. Tidak adanya listrik berdampak pada minimnya distribusi informasi dan pengetahuan bagi pemuda perbatasan di Dusun Merau. Minimnya akses informasi dan pengetahuan ini secara teoretis dapat dianalisa akan berdampak pada rendahnya tingkat refleksifitas pemuda perbatasan. Dalam kajian kepemudaan, kapasitas reflektif sebagai manifestasi dari modal budaya (Threadgold & Nilan, 2009) ini penting sebagai salah satu bentuk kapital yang memungkinkan pemuda secara kritis memahami posisi dirinya dalam ranah sosial yang lebih luas, serta menginisiasi strategi-strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural yang harus dijalani dalam masa transisi.

Faktor kedua, yaitu minimnya fasilitas pendidikan dimana di Dusun Merau fasilitas yang ada hanya sampai sekolah dasar (SD). Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat kondisi SD di Dusun Merau dan menemukan bahwa belum terdapat perpustakaan, serta fasilitas lainnya juga masih bersifat minim. Murid SD biasanya mendapatkan pinjaman buku pelajaran dan kemudian dikembalikan lagi setelah kelas selesai. Jumlah guru juga tidak sesuai dengan jumlah kelas, dengan kata lain masih banyak guru yang harus merangkap mengajar. Selain itu, dalam hal ruangan juga mengalami keterbatasan dimana pemakaian ruangan harus bergantian antara kelas I dan kelas selanjutnya (Wawancara dengan Kepala Dusun, Merau, 2012). Minimnya fasilitas pendidikan ini membuat Dusun Merau mengalami ketergantungan dengan dusun atau desa yang lain. Misalnya untuk melanjutkan ke jenjang SLTP, pemuda harus menempuh sekitar satu jam dengan berjalan kaki ke Dusun Serangkang (Wawancara dengan Erna, 2012). Sedangkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi khususnya SLTA atau SMK, mereka harus pindah baik secara permanen ataupun non-permanen ke Desa Entikong atau mungkin lebih jauh lagi ke Kabupaten Sanggau.

Sebagaimana dijelaskan di atas, minimnya fasilitas pendidikan berdampak pada kualitas hidup dan harapan hidup pemuda perbatasan di masa depan. Salah satu dampak yang telah terjadi adalah rendahnya tingkat pendidikan mayoritas penduduk Dusun Merau (315 orang lulusan SD). Realitas objektif ini berbeda sangat tajam dengan penduduk lulusan SLTP dan SLTA yang hanya berjumlah 35 dan 25 orang sebagaimana tertulis dalam Profil Dusun Merau (2011). Secara implisit, kecenderungan ini menunjukkan fenomena terjadinya reproduksi sosial (Bourdieu & Wacquant 1992), dimana rendahnya tingkat pendidikan ini berdampak pada minimnya alternatif lain dalam hal pekerjaan selain sebagai petani sebagaimana profesi orang tua mereka sebelumnya. Dengan kondisi ekonomi yang masih bersifat subsisten dan keterisolasian jarak dengan kota, maka dalam persepsi pemuda perbatasan menjadi petani merupakan salah satu opsi yang paling realistis. Selain faktor struktural, proses reproduksi sosial ini juga terkait dengan keterlekatan pemuda perbatasan dengan keluarga dan komunitas dimana mereka hidup atau dengan kata lain keluarga dan komunitas merupakan sumber makna utama (*ultimate source of meaning*) sekaligus *source of capitals* (Bourdieu & Wacquant 1992), antara lain: kapital, ekonomi, sosial dan budaya bagi kehidupan sehari-hari mereka.

Faktor ketiga adalah minimnya infrastruktur terutama jalan yang menghubungkan Dusun Merau dengan dusun maupun kota yang lain dan minimnya fasilitas transportasi publik. Kedua faktor ini menjadi penghambat bagi pemuda perbatasan untuk dapat mengakses fasilitas-fasilitas lain, misalnya: bahan makanan pokok, pendidikan yang lebih tinggi, fasilitas kesehatan yang lebih layak, serta fasilitas hiburan yang dapat mengembangkan potensi mereka sebagai subjek yang sedang tumbuh dan memperluas jaringan sosial dengan teman sebaya. Dalam konteks Globalisasi yang semakin kompleks, keterhubungan dengan jaringan sosial yang lebih luas baik dalam skala lokal, nasional dan global merupakan elemen yang penting, dengan kata lain kemampuan untuk



melakukan mobilitas dan membangun *networks capital* (Urry, 2007) merupakan strategi yang berharga supaya dapat bertahan dari arus deras Globalisasi.

Keterisolasian dalam era Globalisasi sekarang ini berarti ketertinggalan dalam berbagai aspek baik ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan observasi di lapangan, kondisi ideal jalan penghubung dan sarana transportasi publik masih jauh untuk dicapai dan diwujudkan bagi pemuda perbatasan di Dusun Merau. Jalan yang tersedia masih dikategorikan sebagai tidak layak dan penuh risiko. Hal ini ditambah lagi dengan kondisi ekonomi bahwa tidak semua penduduk Merau dapat mengakses alat transportasi pribadi berupa motor. Alternatif yang lain sebagai moda transportasi publik adalah melalui jalur sungai dengan perahu kecil yang juga tidak beroperasi setiap hari melainkan seminggu sekali pada saat akhir minggu. Kondisi objektif moda transportasi publik berupa kapal ini juga tidak dapat diakses oleh semua penduduk dikarenakan mahal biaya untuk sekali tempuh, hal ini sebagai dampak dari bahan bakar yang harus didapat dari Desa Entikong ataupun dari Malaysia. Dengan kata lain, minimnya infrastruktur berupa jalan dan alat transportasi publik yang memadai menjadi hambatan struktural bagi transisi pemuda perbatasan.

### ***Fast Track, Mobilitas Dan Ketidakpastian Dalam Masa Transisi***

Dinamika sosial penduduk Dusun Merau tidak selalu berlangsung secara statis, namun telah mengalami berbagai perubahan sosial dari masa ke masa. Program pembangunan yang erat dengan misi Modernisasi, serta akhir-akhir ini derasnya arus Globalisasi secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada dinamika sosial penduduk Dusun Merau. Meskipun letaknya yang relatif terisolir, Dusun Merau dalam tingkatan tertentu telah terinternalisasi nilai-nilai Modernisasi dan Globalisasi terutama sebagai akibat dari interaksi dengan penduduk Desa Entikong, Sanggau, pendatang maupun dengan warga Malaysia melalui aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial lainnya. Interaksi sosial dengan penduduk yang dapat dikategorikan sebagai “orang kota” ini membawa dampak pada aspirasi pemuda perbatasan untuk mengikuti pola hidup penduduk kota.

Dinamika sosial lainnya di Dusun Merau yang diakibatkan oleh pesatnya perubahan sosial adalah semakin minimnya kemampuan sumberdaya komunitas maupun dusun untuk mendukung kehidupan sehari-hari penduduknya termasuk pemuda perbatasan. Aktivitas perdagangan dengan Desa Entikong maupun Malaysia dan ekspansi kapital global termasuk akhir-akhir ini konversi lahan pertanian untuk perkebunan kelapa sawit (Wawancara dengan Erna, 2012) membuat daya tahan dusun semakin berkurang dikarenakan ketergantungannya dengan pihak-pihak luar, misalnya melalui aktivitas perdagangan dengan Malaysia secara tidak langsung membuat penduduk Dusun Merau berinteraksi dengan mata uang global terutama ringgit, serta terpengaruh dengan ketidakstabilan nilai kurs. Kedua faktor ini baik interaksi dengan dunia luar dan minimnya kemampuan sumberdaya komunitas dan dusun, serta hambatan struktural membawa dampak pada

rute yang harus ditempuh oleh pemuda perbatasan dalam masa transisi. Berdasarkan data empiris dan observasi, peneliti menemukan ada tiga rute (*pathways*) yang ditempuh oleh pemuda perbatasan dalam transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

Rute pertama, yaitu pemuda perbatasan harus menempuh jalur *fast track*. Dalam konteks Dusun Merau, *fast track transition* ini adalah langsung bekerja setelah lulus SD dengan melanjutkan pekerjaan sebagai petani dan menetap di Dusun Merau. Dengan kondisi minimnya fasilitas pendidikan dan rendahnya tingkat perekonomian penduduk Merau, maka langsung bekerja dan melanjutkan usaha pertanian merupakan opsi yang realistis untuk dapat *survive* dalam kehidupan sehari-hari. Bagi pemuda perbatasan, modal yang tersedia terutama *objectified cultural capital* (Bourdieu & Wacquant, 1992) berupa gelar yang hanya berupa lulusan SD sangat tidak mencukupi untuk bisa bersaing dalam pasar kerja, baik di tingkat nasional maupun global. Tren dalam tingkat nasional, tingkat pendidikan generasi muda Indonesia kontemporer terutama perkotaan jauh lebih meningkat dari generasi sebelumnya (Sutopo, 2013) sehingga peluangnya sangat kecil bagi pemuda perbatasan untuk bersaing bahkan dalam pasar kerja nasional. Kondisi objektif ini membuat pemuda perbatasan menggunakan mekanisme *survival* terutama dengan mendayagunakan kapital yang telah ada berupa lahan pertanian milik keluarga sebagai opsi untuk bekerja. Dengan menggarap lahan pertanian keluarga, maka akan ada peluang bagi mereka untuk ke depan sebagaimana generasi sebelumnya mengkonversi menjadi kapital ekonomi dengan menjual hasil-hasil pertanian ke Desa Entikong maupun ke penduduk Malaysia. Dengan opsi menggarap lahan pertanian, maka pemuda perbatasan harus menetap dan membangun keluarga di Dusun Merau. Keputusan ini dapat berimplikasi pada dua hal, di satu sisi pemuda perbatasan relatif masih memiliki *on hand stock of capital* berupa modal sosial dari keluarga dan komunitas, namun disisi yang lain kehidupan sehari-hari pemuda perbatasan akan berada dalam *mode of survival* atau subsisten dikarenakan daya dukung dusun yang semakin berkurang. Selain itu, di masa depan, pemuda perbatasan harus menghadapi tantangan yang lebih besar akibat penetrasi kapital global melalui perkebunan kelapa sawit terutama ancaman akan adanya pencaplokan lahan secara paksa (*land dispossession*). Dalam banyak kasus di Kalimantan, konversi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit adalah fenomena yang terjadi secara masif pasca era Reformasi. Negara sebagai pihak yang seharusnya melindungi warganya justru mendayagunakan *ideological* dan *repressive state apparatuses* (Althusser, 1970) untuk melindungi kepentingan pemilik modal. Sebagai dampaknya, penduduk lokal sering tidak mempunyai kuasa untuk mempertahankan lahan mereka dan “dipaksa” alih profesi menjadi buruh perkebunan kelapa sawit. Menurut prediksi peneliti, hal ini kemungkinan akan terjadi di masa depan dikarenakan sudah terjadi alih lahan besar-besaran oleh perusahaan kelapa sawit di sekitar Dusun Merau. Untuk mencegah hal tersebut, maka diperlukan inisiatif dari berbagai elemen masyarakat sipil untuk membangun jaringan,

melakukan advokasi dan perlawanan guna melindungi hak-hak dasar, serta keberlanjutan hidup dari generasi penerus di Dusun Merau.

Rute kedua, yaitu pemuda perbatasan menempuh jalur *fast track* dan melakukan mobilitas baik *permanent* maupun *temporary* ke Desa Entikong, Kota Pontianak ataupun Negara Malaysia untuk bekerja sebagai buruh, pembantu rumah tangga maupun pedagang di sektor informal. Kondisi ekonomi keluarga, serta minimnya fasilitas pendidikan membuat pemuda perbatasan terpaksa harus bekerja meskipun dengan kualifikasi yang rendah. Hal ini berdampak pada opsi pekerjaan yang juga sangat terbatas dan terkonsentrasi pada kerja kasar. Para pemuda perbatasan biasanya pindah ke Desa Entikong untuk bekerja sebagai buruh, misalnya kuli angkut di pasar tradisional. Mereka ada yang menetap dan ada juga yang secara tidak teratur pulang-pergi dari Desa Entikong-Dusun Merau. Pekerjaan sebagai buruh atau kuli angkut merupakan bentuk pekerjaan yang tidak menjanjikan jaminan maupun kepastian, dengan kata lain transisi pemuda perbatasan berada dalam kondisi *precarious*, *uncertain* dan *insecure* (Furlong & Cartmel, 2007; Sutopo, 2014). Sebagai buruh atau kuli angkut, pemuda perbatasan bekerja sesuai *order*, misalnya jika ada truk dari perbatasan yang ingin menurunkan barang di pasar dan mereka mendapat upah per/angkut. Selain itu, aktivitas pekerjaan yang juga dilakukan dengan strategi mobilitas non-permanen adalah berdagang di sektor informal, misalnya warung kebutuhan pokok ataupun warung makan. Lebih lanjut, pemuda perbatasan biasanya mendapatkan informasi pekerjaan tersebut melalui mekanisme *word of mouth* terutama dari jaringan sosial keluarga maupun antarpenduduk Dusun Merau. Selain itu, strategi mobilitas untuk mendapatkan pekerjaan juga ditempuh oleh pemuda perbatasan dengan menjadi tenaga kerja di Negara Malaysia. Bagi pemuda perbatasan laki-laki, biasanya mereka diperkerjakan sebagai buruh bangunan dan bagi perempuan biasanya diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Mekanisme menjadi TKI ini dapat melalui jalur formal maupun jalur informal. Salah satu lokasi Dusun Merau yang berbatasan langsung (via darat) dengan Malaysia seringkali menjadi jalur alternatif untuk pemuda perbatasan melakukan mobilitas dan bekerja sebagai TKI. Jenis pekerjaan ini menjadi opsi bagi pemuda perbatasan untuk sukses dalam menjalani transisi namun tetap saja pemuda perbatasan harus dihadapkan pada kondisi kerja yang tidak layak, tidak adanya asuransi kesehatan, eksploitasi dan ketidakberpihakan penegak hukum apabila terjadi kasus dengan majikan mereka di Malaysia. Dengan kata lain, meskipun mereka sukses mendapatkan pekerjaan, namun ke depan mereka harus tetap menghadapi risiko ketidakpastian (*uncertainty*).

Rute ketiga, yaitu pemuda perbatasan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SLTP, SLTA/SMK). Rute ini merupakan rute yang paling jarang ditempuh oleh pemuda perbatasan dalam proses transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dalam kajian kepemudaan, fenomena ini dinamakan sebagai *extended transition* terutama pengkonstruksian bahwa pemuda melanjutkan ke pendidikan tinggi (universitas) dengan tujuan sebagai investasi masa depan untuk

memperoleh pekerjaan (Furlong & Cartmel, 2007). Logika argumen *extended transition* ini bias terutama pada fenomena transisi pemuda perkotaan dan dari kelas sosial menengah dan menengah atas (*middle/middle-high class*). Hal ini dikarenakan asumsi bahwa keluarga kelas menengah dan menengah atas mampu secara ekonomi mensubsidi biaya pendidikan anaknya. Dalam kasus Dusun Merau, mampu melanjutkan hingga tingkat SLTA/SMK dapat dikategorikan sebagai *extended transition* karena mayoritas penduduk hanya lulusan SD. Hal ini dikarenakan berdasarkan kelas sosial, mayoritas penduduk Dusun Merau mungkin dapat digolongkan dalam kategori *underclass* (Macdonald & Marsh, 2005) dengan kekhususan konteks lokal berupa daerah terisolir, ketiadaan akses fasilitas dasar dan absennya subsidi negara.

Temuan dari Dusun Merau ini menjadi sumbangan bagi pendekatan transisi dimana pada daerah terisolir *extended transition* diartikan bukan melanjutkan ke pendidikan tinggi, namun melanjutkan pada batas maksimal pendidikan dasar (SLTA/SMK). Dalam kasus pemuda perbatasan di Dusun Merau, *extended transition* ke tingkat SLTA/SMK berdasarkan Profil Dusun Tahun 2011 merupakan fenomena yang sangat jarang ditemui. Dengan kata lain, jalur transisi pemuda perbatasan dari Dusun Merau mayoritas hanya melanjutkan hingga tingkat SD dan bahkan tidak lulus SD dan langsung bekerja, baik sebagai petani maupun sebagai buruh dengan berpindah ke Desa Entikong, Kota Pontianak maupun ke Negara Malaysia. Rute lain yang juga ditemukan peneliti adalah pemuda perbatasan khususnya perempuan tidak melanjutkan transisi ke dunia kerja, namun langsung melanjutkan ke lembaga pernikahan, mempunyai anak dan menjadi ibu rumah tangga. Ketiga rute transisi tersebut bukan merupakan pilihan yang menjanjikan bagi pemuda perbatasan dikarenakan ketiganya sama-sama dihadapkan pada risiko ketidakamanan dan ketidakpastian (Beck, 1992) dalam berbagai aspek kehidupan mereka di masa sekarang dan masa depan.

## **KESIMPULAN DAN AGENDA KE DEPAN**

Analisa mengenai transisi pemuda perbatasan dengan kasus Dusun Merau yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa hambatan terbesar dalam menjalani transisi adalah faktor struktural. Hambatan ini dapat diperinci berupa minimnya fasilitas, baik infrastruktur fisik seperti: fasilitas listrik, jalan yang layak, moda transportasi publik, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hambatan struktural ini eksis secara *objective* dan dari masa ke masa cenderung tidak mengalami perbaikan. Dengan kata lain, fenomena ini merepresentasikan kebijakan negara yang dianggap belum memperhatikan daerah perbatasan termasuk pemuda perbatasan.

Sebagai dampak dari hambatan struktural dan perubahan sosial yang masif, peneliti menemukan tiga rute transisi pemuda perbatasan dari dunia pendidikan menuju dunia kerja, antara lain: 1) *fast track*/bertani/menetap, 2) *fast track*/buruh/mobilitas dan 3) *extended transition* sampai tingkat SLTA/SMK. Temuan ketiga merupakan fenomena yang sangat jarang dilakukan pemuda

perbatasan Merau. Rute yang lain bagi pemuda perempuan, mereka tidak melanjutkan ke dunia kerja, tetapi melanjutkan ke lembaga pernikahan, mempunyai anak dan menjadi ibu rumah tangga. Dari dialog antara data empiris, teori dan refleksi penulis, dikarenakan kualifikasi pendidikan yang rendah (Lulusan SD) membuat mayoritas pekerjaan pemuda perbatasan yang melakukan mobilitas hanya sebagai buruh, baik di Desa Entikong, Kota Pontianak maupun Negara Malaysia. Pekerjaan tersebut merepresentasikan posisi terendah dalam hierarki struktur pekerjaan dimana risiko terbesar adalah mereka rentan untuk dieksploitasi dalam berbagai hal. Di sisi yang lain, pemuda perbatasan yang melanjutkan tradisi sebagai petani juga rentan terhadap risiko di masa depan terkait dengan daya dukung dusun dan komunitas yang semakin berkurang, serta ancaman akan pencaplokan lahan secara paksa (*land dispossession*) untuk dikonversikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Dengan kata lain, transisi pemuda perbatasan menuju dunia kerja berada dalam kondisi *precarious, insecure* dan *uncertain*.

Berdasarkan temuan dalam artikel ini, peneliti mengusulkan beberapa agenda ke depan baik dalam pengembangan kajian kepemudaan di daerah perbatasan Indonesia maupun agenda praktis. Secara akademis, hasil penelitian ini mengusulkan empat konsep kunci dalam memahami transisi pemuda perbatasan di Indonesia, yaitu: hambatan struktural, *fast track*, mobilitas dan ketidakpastian. Ke depan, keempat konsep tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut di berbagai daerah perbatasan berdasarkan konteks sosial-budayanya masing-masing. Selain itu, kajian kepemudaan selanjutnya tidak boleh hanya terfokus pada transisi pemuda perbatasan dari dunia pendidikan ke dunia kerja, namun dapat dikembangkan pada transisi ke lembaga pernikahan, serta aspek budaya (*youth culture*) dari pemuda perbatasan.

Secara praktis, berdasarkan temuan mengenai transisi pemuda perbatasan, Negara perlu hadir secara manusiawi untuk mereduksi hambatan-hambatan struktural yang harus dihadapi pemuda perbatasan. Dengan kata lain, Negara perlu segera membangun fasilitas pendidikan yang lebih terpadu, fasilitas listrik, fasilitas jalan yang layak dan moda transportasi publik gratis, serta fasilitas kesehatan yang memadai. Pembangunan tersebut tidak hanya dalam hal fisik namun juga perlu dipersiapkan pula *soft aspect* berupa ketersediaan dan kapasitas sumberdaya manusia penunjang yang berkelanjutan guna mendukung proses transisi pemuda perbatasan. Selain itu, Negara seharusnya memfasilitasi biaya pendidikan pemuda perbatasan dengan memberikan beasiswa hingga minimal tingkat SLTA/SMK dan maksimal hingga tingkat pendidikan tinggi. Dengan dukungan ini, kedepannya pemuda perbatasan mungkin akan benar-benar merasakan bahwa daerah mereka merupakan beranda depan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Althusser, Louis. 1970. *Ideology and Ideological State Apparatuses*. In *Lenin and Philosophy and Other Essays*. Paris: Monthly Review Press.
- Beck, Ulrich. 1992. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage Publication.
- Bourdieu, Pierre & Wacquant, Loic. 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Cambridge: Polity Press.
- France, Alan. 2007. *Understanding Youth in Late Modernity*. New York: Open University Press.
- France, Alan & Roberts, Steven. 2015. *The Problem of Social Generations: a Critique of the New Emerging Orthodoxy in Youth Studies*. *Journal of Youth Studies*. Vol. 18 No. 2: 215-230.
- Furlong, Andy & Cartmel, Fred. 2007. *Young People and Social Change: New Perspectives*. Berkshire: McGrawhill.
- Macdonald, Robert & Marsh. Jane. 2005. *Disconnected Youth? Growing Up in Britain's Poor Neighbourhoods*. UK: Palgrave Macmillan.
- Maton, Karl. 2003. *Reflexivity, Relationism and Research: Pierre Bourdieu and the Epistemic Conditions of Social Scientific Knowledge*. *Space & Culture*. Vol. 6 No.1: 52-65.
- Roberts, Ken. 2007. *Youth Transitions and Generations: a Response to Wyn and Woodman*. *Journal of Youth Studies*. Vol. 10 No. 2: 263-269.
- Santoso, Purwo *et.al.* 2015. *Sabuk Kesejahteraan Nusantara: Merajut Desa-Desa Perbatasan Sebagai beranda Depan Indonesia*. Makalah disajikan dalam FGD Rembug Nasional Membangun Wilayah Perbatasan, Bappenas, Jakarta.
- Siburian, Robert. 2002. *Entikong: Daerah tanpa Krisis Ekonomi di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*. *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 67: 87-93.
- Sutopo, Oki Rahadiano. 2013. *Hidup adalah Perjuangan: Strategi Pemuda Yogyakarta dalam Transisi dari Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja*. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. Vol. 18 No. 2: 161-179.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Social Generation, Class and Experiences of Youth Transition in Indonesia*. *Asian Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol. 3 No. 3: 126-134.
- Sutopo, Oki Rahadiano & Azca, M. Najib. 2013. *Transisi Pemuda Yogyakarta Menuju Dunia Kerja: Narasi dan Perspektif dari Selatan*. *Jurnal Universitas Paramadina*. Vol. 10 No. 2: 698-719.
- Threadgold, Steven & Nilan, Pam. 2009. *Reflexivity of Contemporary Youth, Risk and Cultural Capital*. *Current Sociology*. Vol. 57 No. 1: 47-68.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2002. *Kalimantan Barat sebagai Daerah Perbatasan: Sebuah Tinjauan Demografi Politik*. *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 67: 30-45.
- Urry, John. 2007. *Mobilities*. Cambridge: Polity.
- Wismayanti, Yanuar Farida. 2012. *Perlindungan Anak Berbasis Komunitas di Wilayah Perbatasan*. *Jurnal Sosiokonsepsia*. Vol. 17 No. 1: 1-17.
- Wyn, Johanna & White, Rob. 1997. *Rethinking Youth*. Australia: Allen & Unwin.
- Wyn, Johanna & Woodman, Dan. 2006. *Generation, Youth and Social Change in Australia*. *Journal of Youth Studies* Vol. 9 No. 5: 495-514.